

## **VISI DAN MISI SBSI KUAT RAKYAT SEJAHTERA**

### **1. Pendahuluan**

SBSI kuat rakyat sejahtera adalah thema Kongres SBSI ke IV tahun 2003 dan Kongres V tahun 2014. Sebagai thema Kongres, menjadi thema perjuangan serta arah perjuangan SBSI selama periode kongres tersebut.

Cita-cita SBSI adalah memakmurkan/mensejahterakan rakyat/buruh. Supaya kemakmuran/ kesejahteraan itu dapat diraih, terlebih dahulu harus diwujudkan sistem kenegaraan welfarestate. Supaya welfarestate terwujud, Serikat Buruh harus bersatu atau SBSI harus kuat. SBSI kuat rakyat sejahtera atau buruh bersatu pasti menang mewujudkan buruh sejahtera.

### **2. SBSI kuat rakyat sejahtera, atau Buruh bersatu pasti menang**

Saat tulisan ini dibuat ada 98 Serikat Buruh yang mengaku sebagai serikat buruh tingkat nasional karena berada di Jakarta. Yang ideal adalah kalau semua Serikat Buruh bersatu dalam satu wadah yang sering saya usulkan bernama Dewan Buruh Nasional. Biar saja tetap berbeda Serikat Buruh, tetapi bersatu dalam hal: melawan union busting, membangun solidaritas, membahas RUU atau kebijakan perburuhan, dan politik. Sekiranya saat ini semua Serikat Buruh bersatu, langsung mempunyai keanggotaan sekitar 10juta. Bila 10 juta buruh bersatu, itu kekuatan yang langsung dapat memenangkan pertandingan politik. Kita dapat bayangkan bila yang 10 juta rata-rata ditambahkan pasangannya, langsung memperoleh suara 20jt pada suatu pemilihan umum. 20 juta suara dalam pemilihan umum, buruh menjadi pemenang, kemudian Menteri dan jabatan lainnya yang mendorong terwujudnya welfarestate diduduki para unionis. Saya dapat pastikan welfarestate segera terwujud, lalu buruh pun menikmati kemakmuran dan kesejahteraan.

Tetapi Kenyataan? Mempersatukan buruh itu kelihatannya adalah pekerjaan yang sangat sulit. Mengapa? Idiologi, visi, latar belakang pendirian, sejarah pendirian dan tujuan dari semua pemimpin serikat buruh itu adalah berbeda. Saya sebagai pendiri dan pimpinan SBSI sudah mengusahakan mempersatukan beberapa kali, dan sudah terbentuk dalam FSUI (Forum Solidaritas Union Indonesia) tahun 1999 dan dan ikut menginisiasi MPBI (Majelis Pekerja/Buruh Indonesia) tahun 2011. Namuan ahirnya FSUI tidak berbekas, dan MPBI sudah seperti mati suri. Dari fakta itu, menurut saya yang realistis adalah membangun SBSI yang kuat.

### 3. Ciri-ciri SBSI yang kuat

1. Suaranya didengar, mitranya pemerintah dan Apindo serta kompetitor Serikat Buruh lainnya berhitung untuk membantah. Tentu karena dasarnya benar, tujuannya benar, argumentasinya logis bagi kepentingan umum, dan cara menempuhnya mulai dari yang tenang negosiasi hingga ke yang adu kuat mogok dan demonstrasi dan kalau perlu melahirkan revolusi buruh.
2. Banyak pihak membutuhkannya sebagai teman dan semua pihak menghindarinya menjadi lawan atau musuh. Karena itu, pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, para pimpinan partai mendatanginya karena membutuhkan suaranya. Atau kalau mempunyai partai sendiri akan memenangkan setiap pemilihan umum. Akan banyak orang mendekat setiap saat sesuai kepentingannya seperti pilkada atau setiap seleksi jabatan yang membutuhkan dukungan. Tetapi hal itu tidak terjadi karena SBSI masih kecil dan Serikat Buruh pun tidak bersatu, sehingga masih berposisi tidak terasa sebagai teman, dan tidak ditakuti sebagai lawan.
3. Secara organisasi mempunyai struktur yang kuat di semua provinsi dan di semua kota/kabupaten. Semua DPC sudah definitif serta mempunyai minimal dua orang tenaga full timer, serta memiliki kembali 1,7 juta anggota yang sudah pendidikan batra (basic Training) dan aktif membayar iuran (seperti tahun 2003).
4. Mempunyai uang yang banyak, yang utamanya bersumber dari iuran sehingga mampu membiayai full timer dan kegiatan untuk memperjuangkan kepentingan kesejahteraan anggota, dan mewujudkan welfarestate.
5. Mempunyai minimal dua orang pemimpin yang kuat komitmen perburuhannya di setiap DPC, dan di semua DPC ada minimal dua orang fulltimer yang bekerja penuh untuk buruh melalui SBSI.

Bila 5 butir di atas sudah tercapai, pada saat itu SBSI telah menjadi organisasi perjuangan dan sekaligus organisasi profesi lapangan kerja. Kemudian yang bekerja purna waktu di SBSI mendapat nama pekerjaan sebagai profesi unionis<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ketika Kongres V SBSI berlangsung, saya sebagai Ketua Umum DPP SBSI membuat target kerja, keadaan SBSI 2003 diusahakan dapat diraih pada Kongres ke VI tahun 2018, selambat-lambatnya 2022. Adapun keberanian memasang target 2018, ada harapan bila Joko Widodo Presiden, beliau dekat dengan buruh, hapus outsourcing, stop union busting, dan istana milik rakyat. Harapan itu menjadi kuat, ketika Joko Widodo hadir di kongres, kemudian dia berjanji welfarestate, trisakrti ditambah nawacita. Semua janji itu akan dikerjakan oleh kabinet yang bersih, professional dan non-transaksional.

#### **4. Membangun SBSI yang kuat**

Di semua tingkatan (DPC, Korwil dan DPP) SBSI, ditetapkan lima kegiatan/pekerjaan utama SBSI yang harus dikerjakan dengan terprogram dan terlaksana. Kelima kegiatan itu adalah: 1. Advokasi, 2. Konsolidasi, 3. pendidikan dan pelatihan 4. Tripartit dan 5. Menata administrasi organisasi yang tertata rapi, akurat dan keuangan transparan dan akuntabel<sup>2</sup>. Setelah yang lima itu ditambah pekerjaan usaha kesejahteraan, kegiatan anti korupsi, kampanye anti pelanggaran HAM, kegiatan penegakan hukum dan keadilan sosial, dan kampanye pembangunan berkelanjutan. Karenanya yang ideal SBSI sebagai sebuah gerakan buruh dan sebuah gerakan sosial.

Advokasi. Mengapa tugas advokasi saya tuliskan sebagai butir nomor satu, karena dari pengalaman saya menjadi pengacara buruh sejak tahun 1978, yang dibutuhkan buruh adalah mengadvokasi hak-hak dan kepentingan buruh. Advokasi adalah alasan utama mengapa kehadiran SBSI dibutuhkan selanjutnya dideklarasikan. SBSI lahir dan hadir adalah untuk membela (mengadvokasi) hak dan kepentingan buruh. Hal-hal penting yang harus dikerjakan di semua tingkatan terutama DPC, Korwil dan DPP adalah:

1. Dimana ada rakyat/buruh yang menderita akibat kebijakan, SBSI wajib memberikan pembelaan.
2. Di tingkat perusahaan, SBSI membentuk PK (Pengurus Komisariat) dan menghadirkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama).
3. Di tingkat kabupaten /kota dan provinsi, SBSI mengusahakan ada Perda yang menguntungkan buruh, dan di tingkat nasional memperjuangkan adanya undang-undang yang menguntungkan buruh (adil).
4. Menjadi keharusan bahwa Ketua dan Sekretaris di DPC dan Korwil, harus mampu menjadi advokat di internal proses Perselisihan Hubungan Industrial.

Konsolidasi. Tugas membangun organisasi yang kuat melalui kegiatan konsolidasi adalah sangat penting dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan di bidang konsolidasi adalah:

1. Merekrut anggota di perusahaan atau di semua tempat kerja penerima upah/gaji. Kalau sudah ada anggota berjumlah minimal 10 orang dibentuklah PK (Pengurus Komisariat). SK PK dan KTA dikeluarkan DPC. Korwil dapat mengeluarkan surat keputusan PK dan KTA (Kartu Tanda Anggota) bila DPC belum ada, dan dapat dilakukan oleh DPP bila korwil juga belum ada dan atau karena ada

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 12, 16, 18 dan 22 Anggaran Rumah Tangga SBSI

kepentingan organisasi jangka panjang. Dengan catatan, akan dicabut kemudian hari bila DPC sudah terbentuk.

2. Membentuk dan menghadirkan struktur DPC di semua kota/kabupaten. Pada dasarnya Satu DPC untuk satu kota/kabupaten, tetapi bisa satu DPC untuk beberapa kota/kabupaten.
3. Membentuk korwil di semua provinsi. Alhamdulillah dan segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saat tulisan ini ditulis, semua Korwil sudah terbentuk di 34 Provinsi.
4. Membangun solidaritas dan soliditas yang kuat secara hirarchie, DPP membangun solidaritas dan soliditas nasional, Korwil membangun solidaritas dan soliditas se provinsi, dan DPC membangun solidaritas dan soliditas se DPC. DPP mengunjungi dan menguatkan Korwil, Korwil mengunjungi dan menguatkan DPC, dan DPC mengunjungi dan menguatkan PK.
5. Menjalankan kewajiban konstitusional, DPC wajib mengadakan Rapat Pleno diperluas setiap bulannya dengan menghadirkan PK-PK, Korwil wajib melakukan rakerwil tiap tahun dan rakorwil tiap tiga bulan dengan berpindah-pindah tempat, DPC menjadi tuan rumah. DPP wajib melaksanakan rakernas setiap tahun dihadiri ketua MPW dan Korwil (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).<sup>3</sup>
6. Target konsolidasi SBSI, pada saatnya semua penerima upah/gaji direkrut menjadi anggota SBSI, dengan menawarkan;
  - a) Perlindungan hukum dan dalam arti seluas-luasnya
  - b) Pendidikan latihan
  - c) Aksi solidaritas, berkenalan dengan buruh lain
  - d) Masuk BPJS Kesehatan, dijamin kesehatan seumur hidup
  - e) Masuk BPJS ketenagakerjaan, menerima gaji pensiun seumur hidup. Mereka yang kita priostasikan: yang bekerja di ruko, warung makan, di pasar, supir, bongkar muat, ngojek/becak, bengkel, pom bensin, apothek, restaurant, hotel, pegawai negeri, guru, bank BRI, perkebunan, pabrik dll. Berarti SBSI mempunyai peluang eksis di semua kota/kabupaten<sup>4</sup>.

Pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan sangat penting untuk menanamkan idiologi gerakan buruh, memberi pengetahuan, memberi ketrampilan, dan penguatan kecintaan kepada organisasi. Ada tiga bagian besar diklat di SBSI<sup>5</sup>.

### 1. Pendidikan dan latihan keorganisasian

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 23, 27, 28 dan 37 Anggaran Dasar SBSI hasil Kongres V.

<sup>4</sup> Putusan resolusi Kongres V SBSI. Sebagai kelanjutannya, DPP mengeluarkan brosur semua bidang pekerjaan.

<sup>5</sup>Sistem pendidikan dan Latihan ini sudah diprogram sejak tahun 1993 Kongres I SBSI, dan pada pertama kali sdr Soemarno yang menjadi Direktur Departemen Diklat.

- a) Batra (Basic Training) bagi anggota yang dilakukan oleh PK dan atau DPC. Batra pertama bagi anggota baru, dan Batra lanjutan setiap tahun bagi semua anggota..
- b) BTC (Bargaining Training Course) bagi PK dilakukan oleh DPC dan atau KORWIL. BTC , dilaksanakan setiap tahun dengan kasus-kasus yang sedang berlangsung menjadi pokok bahasan.
- c) LTC (Leadership Training Course) dilakukan oleh Korwil didukung oleh DPP. LTC dilakukan setiap tahun, dengan mengangkat problem kenegakerjaan dan kedaerahan yang ada hubungannya dengan perburuhan. Melalui LTC, DPC dimampukan memimpin PK-PK di daerahnya sekaligus memperjuangkan hak dan kepentingan anggota dan buruh pada umumnya.
- d) TFT dilakukan DPP untuk menyediakan Trainer di setiap Korwil dan DPC. Di setiap Korwil disediakan minimal 2 orang tenaga trainer.
- e) TFO dilakukan oleh DPP buat semua personalia DPP dan Korwil. Semua personalia DPP dan minimal MPW dan Korwil (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) seharusnya mengikuti TFO. Diharapkan pengurus yang sudah menjalani TFO, memiliki wawasan politik perburuhan yang mumpuni, sehingga dapat memahami perkembangan issue dan sekaligus menemukan solusi.

## 2. Pendidikan dan latihan profesi di SBSI

Di serikat-serikat buruh yang pada umumnya sudah mapan, ada beberapa profesi di dalam Serikat Buruh. SBSI pun sejak awal menyiapkan kader-kader SBSI untuk hal itu. Profesi itu adalah seperti berikut.

- a) Paralegal. Di setiap DPC sebaiknya ada satu orang yang terdidik menjadi pelaku advokasi. Mereka mampu membela anggota di dinas tenaga kerja, di kepolisian, di DPRD di PHI dan lain-lain. Diutamakan sarjana Hukum, tetapi tidak harus Sarjana Hukum.
- b) Hakim Adhok. Diupayakan di setiap Pengadilan Negeri ibukota provinsi dan di Mahkamah Agung ada hakim adhok mewakili SBSI.
- c) Humas. Di setiap DPC dan Korwil diusahakan ada satu orang humas, yang mampu memberi informasi ke publik tentang pikiran dan kegiatan SBSI, sekaligus mampu membuat laporan, konperensi pers dan pers release..
- d) Administrator. Di setiap Korwil dan DPC sebaiknya ada yang trampil menata administrasi dan keuangan organisasi sesuai

dengan tuntutan AD/ART SBSI serta tuntutan manajemen modern.

- e) Lobbyis. Di setiap DPC dan Korwil sebaiknya ada satu orang yang terampil melakukan lobby2 dengan posisi di tripartit. Peranan Lobbyis penting ketika merundingkan PKB, ketika ada rancangan peraturan daerah dan rencana kebijakan daerah, dan melobby penyelesaian kasus sebelum ke pengadilan.
- f) Manajemen koperasi. Di setiap DPC diwajibkan ada koperasi SBSI. Untuk menjalankan koperasi ini, dibutuhkan di setiap DPC ada minimal 1 orang yang telah menjalani pelatihan manajemen koperasi.

### 3. Bagian Politik

- a) Pelatihan kesadaran politik bagi semua anggota agar paham keadaan Negara dan secara sadar dan paham menjatuhkan pilihan politik pada pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil, pemilu kepala daerah sesuai visi dan misi SBSI.
- b) Pendidikan politik peburuhan bagi calon yang hendak menduduki jabatan politik di legislatif dan eksekutif..

Tripartit. Tugas ini membuat hubungan tripartit harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan.

1. Mengadakan diskusi, seminar atau sejenisnya tentang hubungan tripartit dengan menghadirkan instansi terkait.
2. Membangun hubungan baik dengan semua instansi pemerintahan yang bterkait, secara khusus diskaker, Bupati, Kepolisian, Kejaksaan, BPJS, Pengadilan PHI dll, dan hubungan baik dengan Apindo, Kadinda dan pengusaha.
3. Menempatkan wakil SBSI di lembaga-lembaga tripartit yakni Dewan Pengupahan, di Lembaga Kerjasama Tripartit, Dewan Kesehatan dan keselamatan kerja, DJSN, BPJS dan lembaga kerjasama tripartit lainnya di pemkab/pemkot, pemrov dan pemerintah nasional.
4. Mengawasi secara intensif penyelenggaraan BPJS.

Administrasi dan keuangan organisasi. Tugas ini yang dikerjakan sekretaris dan bendahara sangat penting membuat organisasi kuat dan utuh.

1. Semua struktur yang eksis PK, DPC dan korwil wajib membuat/memasang papan nama di sekretariat.
2. Semua struktur PK, DPC, Korwil dan sektor wajib membuka rekening di BRI setempat, yang penandatanganan adalah ketua dan

bendahara, sedangkan sekretaris penanggungjawab pengguna dana sehari-hari.

3. Semua uang masuk dan uang keluar wajib menggunakan rekening.
4. Semua arsip surat-surat didokumentasikan/dijilid setiap tahun.
5. Data base organisasi tertata dan tersimpan dengan baik yang diupdate setiap tahun.

Keuangan. Keuangan dikelola dengan prinsip transparan dilaporkan setiap bulan, digunakan untuk kepentingan organisasi yang dibicarakan melalui rapat, dan semua peserta rapat berhak mengetahuinya. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan ada diatur dalam AD/ART dengan diadakannya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sumber keuangan SBSI berasal dari: 1. Iuran anggota 2. APBN dan APBD 3. Donatur, perusahaan dimana ada anggota SBSI, bersedia mendonasi bulanan seberapa ikhlas misalnya 1 juta atau 5 juta. Dan 4. Usaha-usaha organisasi<sup>6</sup>.

#### 5. Penutup

1. SBSI kuat adalah syarat mutlak mencapai cita-cita mewujudkan welfarestate. Dan welfarestate adalah syarat mewujudkan buruh yang makmur dan sejahtera.
2. Tanpa peran serta dan kerja keras semua pengurus dan anggota, mustahil SBSI dapat menjadi besar dan kuat. Karena itu diminta semua anggota dan simpatisan agar aktif bekerja keras membangun SBSI yang kuat.
3. Dihimbau kepada Semua pengurus, anggota dan simpatisan, Kumandangkanlah SBSI Kuat rakyat Sejahtera, lalu perjuangkan atau upayakan, kemudian doakan agar Tuhan memberi ridhoNya memberi kesempatan SBSI besar dan kuat kembali untuk terwujudnya welfarestate.

---

<sup>6</sup> Pasal 25, 26, dan 27 Anggaran Rumah Tangga SBSI dan Pasal 39 Anggaran dasar SBSI.